

**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KAWASAN PERBATASAN
(Suatu Studi di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe)**

*Boyke Richard Paparang¹
Ronny Gosal²
Alfon Kimbal³*

Abstrak

Masyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Marore yang juga terletak di kawasan perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina yang selama ini terkesan terpinggirkan dan kepentingannya terabaikan oleh pemerintah, sehingga dibutuhkan optimalisasi peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Sebagai sebuah kecamatan yang terletak dikawasan perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina yang menyanggah status boder crossing area atau garis lintas batas tentunya masyarakat Kecamatan Marore memiliki permasalahan tersendiri dan sangat kompleks dari berbagai aspek, mulai dari terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini menyangkut pendidikan, dimana masyarakat yang ada di Kecamatan Marore rata-rata hanya mengenyam tingkat pendidikan dasar dan tingkat menengah pertama saja sehingga tingkat pengetahuan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di sekitar sangat minim dan juga akses yang sangat terbatas, selain itu juga sebagai kecamatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang luas wilayahnya rata-rata hanya 1 KM persegi, sudah tentu kultur masyarakatnya adalah masyarakat pesisir yang 90% berprofesi sebagai nelayan, dalam hal ini sebagai nelayan tangkap tradisional dan belum terlalu mengenal sistem budidaya di karenakan sumberdaya manusia yang belum mumpuni . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan perbatasan , metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan informannya adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan , Camat Marore,, Kapitalaung Marore, Kapitalaung Kawio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Marore belumlah optimal.

Kata kunci : Optimalisasi Dan Pemberdayaan

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Berdasarkan data awal yang diperoleh program pemberdayaan yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara universal atau keseluruhan di republic Indonesia adalah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) dimana program pembangunan ini berbasis pada masyarakat dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk secara mandiri menyelesaikan dan memecahkan masalah mereka sendiri. Demikian juga program Pemberdayaan Masyarakat yang di lakukan pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai kabupaten yang bervisi maritim tentunya program utamanya ada pada bidang kelautan dan perikanan contohnya adalah dikurkannya modal pembuatan pumboat yang perencanaan serta pembuatannya di tangani langsung oleh kelompok- kelompok nelayan yang di bentuk, pumboat yang di maksud adalah perahu modern yang menggunakan mesin ketinting sebagai alat penggerak dan mampu mengangkut sampai 5(lima) orang nelayan dan dengan daya jelajah yang lebih jauh dari bibir pantai, untuk selanjutnya di gunakan oleh kelompok nelayan tersebut sebagai pengganti kano yaitu perahu tradisional yang sebelumnya di gunakan oleh masyarakat pesisir terlebih khusus nelayan dalam proses penangkapan ikan yang hanya mampu mengangkut maksimal 2(dua) orang nelayan dan tentunya dengan daya jelajah yang lebih dekat di bandingkan dengan *pumboat*, adapun alat-alat nelayan penunjang juga di berikan oleh pemerintah daerah yaitu berupa rumpon (tempat berkumpulnya ikan) agar nelayan tak perlu Jauh Jauh melaut untuk menangkap ikan, demikian juga dengan *Cool Box* atau kotak penyimpanan ikan di berikan kepada kelompok-kelompok nelayan agar hasil

tangkapan mampu bertahan lebih lama, serta tidak rusak dan kualitasnya terjaga dan ketika dipasarkan nanti memiliki harga yang tinggi.

Selain itu peran pemerintah daerah dalam menjamin kelayakan hidup masyarakatnya melaluai pemberdayaan dengan mengalokasikan dana APBD untuk menyediakan rumah tinggal layak huni sebanyak 93 unit di Kecamatan Marore dengan nominal Per unitnya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun dana yang dimaksud adalah dana stimulant dimana masyarakat harus mengembangkannya. namun tidak dapat dipungkiri peran yang di jalankan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat di daerah pesisir belumlah optimal hal ini dapat dilihat dari beberapa indicator dimana meningkatnya angka anak putus sekolah, kurangnya keterampilan marsyarakat dalam pengelolaan hasil alam, edukasi tentang perbatasan yang masih minim, tingkat partisipasi masyarakat yang rendaaah dalam kegiatan – kegiatan pemberdayaan , serta belum dijalankannya regulasi regulasi yang mengatur tentang pengelolaan wilayah perbatasan.

Berangkat dari beberapa indikator diatas tentunya yang paling utama harus dilakukan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah Kabupaten(daerah) dalam mengoptimalkan perannya dalam pemberdayaan adalah membuat regulasi yang berbasis kemaritiman baik pada regulasi tentang perencanaan pembangunan, pendidikan, penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan sampai pada pengelolaan sumberdaya alam dan pengeloan sumberdaya manusia.

Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari Bahasa Inggris, power

diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Subejo (2004) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang di sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya local yang di miliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Sementara itu menurut Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Secara teoritis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan.

Selain itu menurut Satria (2004:13) Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir. Dan terkadang masyarakat pesisir (*Costal Community*) juga diterjemahkan dengan ciri-ciri utama tidak memproduksi barang ataupun jasa tertentu, biasanya berupa perahu dengan sistem ekonomi yang hirarki seperti ada juragan kapal, tengkulak, buruh, nelayan, tradisional. (Soetandyo Wignyosoebroto, 2005:143).

Selain itu menurut Lewaherilla, (2002:46) Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. demikian pula jenis mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, dan pemilik atau pekerja

industri maritim. Masyarakat pesisir yang di dominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Selain itu Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang pedoman umum perencanaan pengelolaan pesisir terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dan juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu Negara atau bagian-bagiannya. Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2008:122) Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan". Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan

publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Pengertian Optimalisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, p. 986), "Optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb)". Sedangkan dalam Kamus Oxford (2008, p. 358), "*Optimization is the process of finding the best solution to some problem where "best" accords to prestated criteria*". Jadi, Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, topik yang diangkat adalah optimalisasi suatu lokasi (gudang) sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas dan pendapatan perusahaan

Pengertian Optimalisasi Pengertian optimalisasi menurut Poerdwadarminta (Ali, 2014:23) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien". Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (Ali, 2014:49) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka, Menurut Bogdan dan Taylor, (dalam Moleong 2000:3), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaakan masyarakat pesisir di kawasan perbatasan khususnya di kecamatan marore kab sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe yang di kaji dengan teori dari Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*):
2. Partisipasi (*participation*):.
3. Konsep keberlanjutan:
4. Keterpaduan
5. Keuntungan sosial dan ekonomi

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (1 orang)
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (1 orang)
3. Camat Marore (1 orang)
4. Kapitalaung marore(1orang)
5. Kapitalaung kawio (1orang)
6. Tokoh masyarakat (2 orang)
7. Masyarakat (5 orang)

Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan membahas data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang

peneliti lakukan dengan para informan, pembahasan ini merupakan argumentasi peneliti mengenai optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dikawasan perbatasan dalam hal ini yang ada di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dikaji melalui teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) yaitu : pendekatan dari bawah, partisipasi, konsep keberlanjutan, keterpaduan dan keuntungan ekonmi dan social.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Drijver dan Sajise (sutrisno, 2005:18) yang mengatakan bahwa pendekatan dari bawah adalah pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berangkat dari teori ini peneliti melihat apa yang telah dilakukan oleh stake holder sudah sesuai itu dibuktikan dengan apa yang di sampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Kepulauan Sangihe dan Camat Marore memiliki kesamaan tentang bagaimana semua kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe semua mengacu pada aturan yang berlaku secara Nasional yang mengamanatkan untuk semua program yang dilakukan harus diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat yang akan menjadi sasaran pemberdayaan dari Pemerintah daerah sendiri.

Perwujudan langsung dari partisipasi yang dimaksud disini adalah bagaimana masyarakatlah yang terlibat langsung dalam hal mnya dengan memikirkan, memikirkan yang dimaksud disini adalah bagaimana masyarakat sendiri yang memikirkan,

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pemberdayaan yang akan diprogramkan oleh Pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe dan kesemuanya itu sesuai hasil yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan Pemerintah Kecamatan Marore, Pemerintah Desa Marore, Pemerintah Desa Kawio serta tokoh Masyarakat dan Juga beberapa masyarakat dimana semua pihak terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang dimaksud. Mulai dari memikirkan, dimana masyarakat sangat aktif memberi masukan berupa pemikiran-pemikiran atau ide-ide dalam membuat program pemberdayaan di Kecamatan Marore, dalam hal merencanakan juga masyarakat sangat aktif terlibat sebagai contoh kelompok nelayan yang ada biasanya merencanakan kegiatannya sendiri untuk selanjutnya melaksanakan program yang sebelumnya telah direncanakan bahkan mengevaluasi keberhasilan program walaupun memang tetap ada pendampingan dari stake holder yang ada baik itu pemerintah desa, pemerintah Kecamatan Marore dan juga pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi dari masyarakat terhadap program yang dilaksanakan itu ada dan sangat baik.

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan sangihe, beliau mengatakan Hal yang sama dengan yang diungkapkan oleh Camat Marore yang mengatakan bahwa semua program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidaklah diselenggarakan tanpa pertimbangan apapun melainkan melalui perencanaan yang matang dan juga memiliki konsep

keberlanjutan, misalnya pembentukan kelompok nelayan, program ini tidak hanya sampai dalam tahap pembentukan saja melainkan terus diberikan pendampingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah terprogram dan evaluasi keberhasilan program untuk merumuskan program yang baru di tahun berikutnya dan tentunya memiliki kesinambungan program, sampai tujuan dari pemberdayaan yaitu menciptakan masyarakat yang mampu dan mandiri secara social dan ekonomi sepenuhnya terwujud. Jika hal yang disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Camat Marore dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Driver dan Sadjise (dalam Sutrisno, 2005:18) yang juga menjadi grand teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Konsep keberlanjutan yang dimaksud adalah keberlanjutan program dalam hal pengembangan maupun kemitraan dengan semua elemen masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi, dengan demikian apa yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah sangat tepat.

Dalam menjalankan program pemberdayaan bagi masyarakat di Kecamatan Marore, tentunya tidak akan berhasil jika program tersebut hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja tentunya harus dilaksanakan secara bersama-sama baik itu dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat namun dalam pelaksanaan program tersebut haruslah ada keterpaduan antara program pemberdayaan yang dianggarkan melalui dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah) Kabupaten Kepulauan sangihe, APBD Provinsi Sulawesi Utara maupun

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Pemerintah Republik Indonesia. Keterpaduan yang dimaksud adanya hubungan saling melengkapi antara program Daerah, Provinsi dan Pusat.

Data yang peneliti peroleh dilapangan sangat sesuai dengan apa yang menjadi prinsip keterpaduan yang diuraikan diatas, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan yang peneliti wawancarai diantaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pemeberdayaan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Juga camat Marore pada intinya mengatakan bahwa semua program pemberdayaan yang di selenggarakan di Kecamatan Marore atas koordinasi dan Penyesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dan oleh sebab itu program yang dilaksanakan terpadu dan tentunya berdampak baik bagi keberhasilan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan.

Yang menjadi tujuan utama dari program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah adalah masyarakat yang mampu dan mandiri dalam aspek social dan ekonomi. dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dari informan yang adalah masyarakat marore yang menerima program dari pemerintah yang mengatakan memang ada peningkatan taraf hidup masyarakat yang menjadi objek pemberdayaan namun outcome yang di dapatkan belumlah maksimal karena masih ada masyarakat penerima program pemberdayaan yang hidup di bawah garis kemiskinan selain itu masih ada program yang belum terlalu tepat sasaran.

Kesimpulan

1. Peran pemerintah daerah dalam megupayakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Marore kabupaten Kepulauan sangihe sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina sudah cukup baik hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam program pemberdayaan yang dilakukan sebagai salah satu contohnya adalah pembentukan kelompok-kelompok nelayan yang diberikan bantuan alat tangkap dan edukasi berupa pelatihan-pelatihan khusus dalam penangkapan maupun pengolahan hasil laut, namun peran yang di jalankan oleh pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan sangihe belumlah optimal jika dibandingkan dengan kebutuhan dan keseriusan masyarakat dalam menyambut program pemberdayaan yang dimaksud. itu dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang semestinya memperoleh program pemberdayaan namun belum memperoleh program pemberdayaan dari pemerintah daerah.
2. Pendekatan dari bawah yang dilakukan oleh pemerintah, baik Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe maupun Pemerintah Kecamatan Marore selama ini dianggap berhasil ini dibuktikan dengan tingginya anrgusiasme masyarakat menyambut berbagai program pemberdayaan yang selenggarakan oleh pemerintah daerah yang berdampak pada partisipasi masyarakat yang selalu turut serta dalam setiap program yang diselenggarakan baik dalam proses Perencanaan, proses penyelenggaraan hingga tahap evaluasi program.

3. Program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Kepulauan sangihe memiliki konsep keberlanjutan dimana program yang diselenggarakan bertahap atau memiliki konsep yang terus berkembang dari tahun ke tahun sampai target masyarakat terberdayakan akan tercapai, selain itu pula sebagian besar program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sangihe terintegrasi/terpadu dengan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Pusat.
4. Tingkat keberhasilan dari program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe cukup tinggi terhadap masyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Marore dimana kecakapan masyarakat dalam menangkap bahkan mengelola hasil laut sangat baik yang tentunya berdampak pada keuntungan secara social maupun secara ekonomi namun masih ada saja sebagian kecil masyarakat yang telah menerima program pemberdayaan yang belum mencapai kata sejahtera dalam artian belum mengalami keuntungan social maupun ekonomi dari program pemberdayaan yang telah diterima dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Perlu adanya regulasi-regulasi Khusus yang berbasis kepulauan/perbatasan, sebagai contoh kurikulum pendidikan baik mulai dari tingkatan sekolah dasar(SD),sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA) perlu ada Mata pelajaran muatan lokal yang berbasis perikanan agar kelak masyarakat pesisir sadar betul dengan status mereka sebagai masyarakat pesisir yang rentan dalam hal kesejahteraan.
3. Melihat antusiasme warga masyarakat Kecamatan Marore dalam melaksanakan program pemberdayaan tentunya pemerintah Kabupaten Kepulauan harus lebih proaktif lagi dalam merumuskan bersama kegiatan kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Marore.
4. Pada saat ini pemerintahan Ir.Joko Widodo dalam program kerja prioritas memiliki nawa cita yang pada poin 3 (Tiga) mengatajkan : membangun Indonesia darii Desa/Pinggiran, oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Harus “menjemput bola” dalam artian harus lebih proaktif lagi dalam mengusulkan program-program pemberdayaan untuk wilayah perbatasan terlebih khusus kecamatan Marore demi tercapainya masyarakat pesisir yang mampu dan mandiri.

Saran

1. Peran pemerintah Kabupaten Kepulauan sangihe perlu dioptimalkan dalam hal edukasi atau pelatihan-pelatihan khusus untuk masyarakat pesisir di Kecamatan Marore untuk meningkatkan skil Masyarakat.

5. Harus segera tersedianya regulasi perdagangan tradisional lintas Negara dalam wilayah perbatasan, agar nantinya hasil pengelolaan hasil laut boleh dengan mudah untuk dipasarkan ke negara tetangga, karna dapat menghemat biaya transportasi atau pengiriman hasil olahan hasil laut karena jarak antara

marore dengan Bitung yang menjadi sentra perikanan di Sulawesi utara lebih dekat jarak antara marore dan Davao City yg juga menjadi sentra perikanan di Negara Republik Filipina. Agar keuntungan social dan Keuntungan ekonomi lebih mudah untuk dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka dan Hikmat, R.H. 2003. *Participatory Research pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Ali, M. A., 2014, *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimngps.Com* di Samarinda, Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis.
- Harahap, E.St, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat*, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dtrategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Lewaherilla, Niki E. 2002 *Pariwisata Bahari;Pemanfaatan Potensi WilayahPesisir dan LautanMakalah Falsafah Sains (PPs 702)* Program PascaSarjana/ S3 Institut Pertanian Bogor.
- Maurice D. 2010, *Sosiologi Politik, Terjemahan: Daniel Dhakidae*, CV. Rajawali,Jakarta.
- Moleong. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moch. K dan Saragih, R. B, 2008, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama: Jakarta.
- Mubarak, W. & Nurul C. (2007). *Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta :EGC.
- Ndraha, T, 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, I dan Dahuri R. 2004. *Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan)*. LP3ES, Jakarta.
- Rasyid, M.R, 2000, *Makna Pemerintahan–Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.
- Wulansari, D. 2009. *Sosiologi: Konsep dan Teori*. Bandung: PT. Refika Aditama. (39, 42).
- Satria, A.2004. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta. PT. Pustaka Cidesindo.
- Siswanto, 2008. *Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soetandyo Wignjosebroto,2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta.
- Sondang P. S, 2001, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, Bumi Aksara, Jakarta.
- Studi Sosial Capital di Pedesaan Indonesia. *Majalah Agro Ekonomi* Subejo. 2004. *Peranan Sosial Capital Dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu pengantar*.

- Suharto dan Budi Cahyono, 2005. *Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia*, di Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah, JRBI.
- Suharto, E. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sutrisno, 2005, *Statistik Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Suhardi & Sunarti S. (2009). *Sosiologi 2*. Bandung: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Soekanto & Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Tampubolon . 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*.
- Tjandra & Riawan, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Ke-II, Penerbit P.T. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Todaro dan Stephen (2008) *pembangunan ekonomi edisi ke sembilan*, Jakarta, erlangga.
- Wahab, S. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah*. Malang: Percetakan SIC.